

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). Standar Audit 700, Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan. IAPI.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). Standar Audit 705, Modifikasian Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen. IAPI.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Syafruddin, A. (2021). *Gramedia.com*. Diambil kembali dari Gramedia Blog:

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertianapbd/#:~:text=Menurut%20Ateng%20Syafuddin%2C%20fungsi%20dan,tertentu%20yaitu%20satu%20tahun%20anggaran>